



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2025**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. PEMUDA KM. 3 REMBANG TELP/FAX (0295) 691349  
REMBANG - 59219**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga rencana kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam periode tahunan. Selain itu Rencana Kerja 2025 ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 1 (satu) Tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat bermanfaat dan menjadi acuan didalam pencapaian kinerja perangkat daerah, serta demi terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*)

Rembang, 05 Agustus 2024

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Rembang



Drs DWI MARTOPO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670313 199401 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI. ....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2 Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas yang Direncanakan .....	28
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang .....	50
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang .....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG .....	55
BAB V PENUTUP .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rembang .....	8
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2023	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2024 .....	31
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	33
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Rembang .....	43
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang .....	51
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasia Pembangunan daerah Daerh Tata cara evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, untuk kemudian dituangkan kedalam Renstra PD tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, Renstra PD harus dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja PD disusun setiap tahun dengan tetap berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun keempat dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026. Renja-PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025,

akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2024, pemmasalahan dan tantangan berkaitan dengan perindustrian dan tenaga kerja.

Renja-PD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renja- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan implementasi perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam program dan penganggaran yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian dokumen rencana kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

- Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, target capaian dengan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
3. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
4. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya; dan
5. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
- 2) Tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan ;
- 3) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025, meliputi :

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1    Latar Belakang
  - 1.2    Landasan Hukum
  - 1.3    Maksud dan tujuan
  - 1.4    Sistematika Penulisan

Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.2	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai capaian realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam Menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sasaran untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut;

Tugas, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi;

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

2. Melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
3. Melaksanakan kebijakan bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja
5. Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dinas
6. Mengendalikan penyelenggaraan tugas UPTD
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2023 dan perkiraan realisasi pencapaian target renstra tahun 2024;

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Rembang

Kode	Usuran /Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>									
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2 07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									
2 07 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP OPD	71	60,45 Angka	71 Angka	68,00	95,77	72 Angka	72 Angka	100%
		<b>IKM</b>	<b>81,99 Angka</b>	<b>95 Angka</b>	<b>81,99 Angka</b>	<b>81,99 Angka</b>	<b>100%</b>	<b>82,56 Angka</b>	<b>82,56 Angka</b>	<b>106%</b>
2 07 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>91 %</b>	<b>95 %</b>	<b>91 %</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>101%</b>
2 7 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 7 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2 7 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Dokumen	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	58,33%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	07	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,5 %	95 %	95,5 %	95,5%	100%	96%	96%	105%
2	07	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	50 Orang	48 Orang	96%	50 Orang	50 Orang	100%
2	07	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 doc	1 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	109%
2	07	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Lapoarn	0 Lapoarn	0 Lapoarn	0%	1 Lapoarn	1 Lapoarn	100%
2	07	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapoarn	100%	12 Lapoarn	12 Lapoarn	100%
2	07	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik	95%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	100%
2	07	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	07	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	7	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
		Prasarana Disiplin Pegawai												
2	7	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	7	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	07	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	50 Paket	100%
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	100%	30 Paket	30 Paket	100%
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	100%
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	7	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
		Dinamis pada SKPD								
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana Aparatur	95%	0%	95%	95%	100%	95%	95%	100%
2 7 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
2 07 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran	100%	97,75%	100%	95%	95%	100%	100%	100%
2 07 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2 07 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2 07 01 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2 07 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 07 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
2 7 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
2 07 01 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)
2 07 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>	<b>30%</b>	<b>5 %</b>	<b>30 %</b>	<b>60%</b>	<b>200%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
2 07 02 2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase peningkatan database tenaga Kerja</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
2 07 02 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 07 02 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>	<b>100%</b>	<b>181,82 %</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
2 07 03 2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah paket pelatihan</b>	<b>40%</b>	<b>16%</b>	<b>40 Paket</b>	<b>40 paket</b>	<b>100%</b>	<b>45 paket</b>	<b>45 paket</b>	<b>100%</b>
		<b>Jumlah unit kompetensi</b>	<b>698 Unit</b>	<b>178</b>	<b>698 Unit</b>	<b>779 Unit</b>	<b>111,60%</b>	<b>779 Unit</b>	<b>779 Unit</b>	<b>100%</b>
2 07 0 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	248	256 Orang	248 Orang	248 Orang	100%	264 Orang	264 Orang	100%
2 07 03 2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</b>	<b>20 Lembaga</b>	<b>2 Lembaga</b>	<b>20 Lembaga</b>	<b>20 Lembaga</b>	<b>100%</b>	<b>25 Lembaga</b>	<b>25 Lembaga</b>	<b>100%</b>
2 07 03 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	2 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
2 7 3 2.03	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki Perizinan</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>0 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>100%</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>5 Lembaga</b>	<b>100%</b>
2 7 3 2.03 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	0 Perizinan	5 Perizinan	3 Perizinan	60%	5 Perizinan	5 Perizinan	50%
2 7 3 2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas</b>	<b>5 Unit</b>	<b>0 Unit</b>	<b>5 Unit</b>	<b>5 Unit</b>	<b>100%</b>	<b>5 Unit</b>	<b>5 Unit</b>	<b>100%</b>
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	0 Unit Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	10%	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
2 7 3 2.05	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>10 %</b>	<b>0 %</b>	<b>10 %</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
2 7 3 2.05 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan</b>	<b>40%</b>	<b>35%</b>		<b>107,5%</b>	<b>268,75%</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>
2 07 04 2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan antar kerja</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>100%</b>
2 07 04 2.01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	3 Orang	150 Orang	40 Orang	26,67%	3 Orang	3 Orang	100%
2 3 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	20 Orang	20 Orang	100%
2 07 04 2.01 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	30 Orang	150 Orang	350 Orang	233,33%	30 Orang	30 Orang	100%
2 07 04 2.01 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Katenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	5 Orang	20 Orang	400%	15 Orang	15 Orang	100%
2 7 4 2.01 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100 Orang	666,67%	15 Orang	15 Orang	100%
2 7 4 2.02	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah LPTKS</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>100%</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>100%</b>
2 7 4 2.02 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2 7 4 2.02 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah informasi pasar kerja</b>	<b>6 Informasi</b>	<b>5 Informasi NA</b>	<b>6 Informasi</b>	<b>6 Informasi</b>	<b>100%</b>	<b>10 Informasi</b>	<b>10 Informasi</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
2 7 4 2.03 1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Informasi	1 Informasi	100%	1 1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	20 Orang	20 Orang	120 Orang	600%	20 Orang	20 Orang	100%
2 7 4 2.03 3	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	1000 Orang	1000 Orang	100%
2 07 04 2.04	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi</b>	<b>20 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0%</b>	<b>20 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>
2 07 04 2.04 1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Orang	0%	20 Orang	20 Orang	100%
2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>% perusahaan yang taat aturan</b>	<b>57%</b>	<b>50,66%</b>	<b>57%</b>	<b>51,70%</b>	<b>90,70%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>114%</b>
2 07 05 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>	<b>50 Badan usaha</b>	<b>6 Perusahaan</b>	<b>50 Badan usaha</b>	<b>40 Badan usaha</b>	<b>80%</b>	<b>50 Badan usaha</b>	<b>50 Badan usaha</b>	<b>100%</b>
2 07 05 2.01 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	2 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100%	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100%
2 7 5 2.01 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	0 Perusahaan	5 Perusahaan	0 Perusahaan	0%	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100%
2 07 05 2.01 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
		Pengupahan	Jamsostek serta Pengupahan											
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan	50 Perusahaan	2 Perusahaan	50 Perusahaan	130 Perusahaan	260%	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%	
2	07	05	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	2 Perkara	50 Perkara	50 Perkara	100%	50 Perkara	50 Perkara	100%
2	07	05	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	9 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	100%	6 Perkara	6 Perkara	100%
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9 Asosiasi dan Serikat Pekerja	90%	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100%
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	0	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terfasilitasi kesejahteraan pekerjanya	13.800 Orang	0	13.800 Orang	22.600 Orang	164,25%	14.500 Orang	14.500 Orang	100%
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					0,5				

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
3 31 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertumbuhan Usaha Industri</b>	<b>3,0%</b>	<b>8,6%</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>16,67%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>117%</b>
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Yang Didampingi	250 Usaha	430 Usaha	250 Usaha	250 Usaha	100%	250 Usaha	250 Usaha	100%
3 31 02 2.01 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 02 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 02 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 02 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 02 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 02 2.01 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>% usaha industri yang memiliki ijin usaha</b>	<b>15%</b>	<b>4,5%</b>	<b>15%</b>	<b>42%</b>	<b>280%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (UIU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP	56 Unit	26 Unit	56 Unit	61 Unit	108,93%	61 Unit	61 Unit	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)
3 31 03 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	50 Dokumen	1 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	55 Dokumen	55 Dokumen	100%
3 31 03 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Perizinan Berusaha industri dengan skala Usaha Industri Kecil dan industri menengah yang berlokasi disatu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat	25 Dokumen	1 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
3 31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>%usaha industri yang masuk database Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,64%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Database Industri	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	100%	1 Database	1 Database	100%
2		Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
3 31 04 2.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3 31 04 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11=(10/4)				
	Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas												
3	31	04	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pada tabel 2.1 dapat diuraikan capaian target/ program kegiatan sebagai berikut:

- a. Capaian program dan kegiatan antara target dan realisasi pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang sebagai berikut;  
Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP OPD Tahun 2023 dari nilai ditargetkan 71 masih proses dilakukan reviu oleh OPD terkait dan nilai IKM dari target 81,99 terealisasi sebesar 81,99 sehingga pencapaian 100%
- b. Capaian Program dan Kegiatan pada Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
  1. Program perencanaan dan Pembangunan industri untuk pertumbuhan usaha industri yang ditargetkan 3,0% terealisasi 0,5% sehingga pencapaian sebesar 16,6%. Pencapaian yang sangat rendah karena terkendala dengan minimnya pendanaan oleh APBD.
  2. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota, persentase usaha industri yang memiliki izin usaha yang ditargetkan 15% terealisasi 42% sehingga pencapaian sebesar 280%.
- c. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, persentase industri yang masuk data base ditargetkan sebesar 55% terealisasi sebesar 0,90%, sehingga pencapaian sebesar 1,84%
- d. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 100%
- e. Capaian Program dan Kegiatan Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial, persentase Perusahaan yang taat aturan ditargetkan sebesar 57,00% terealisasi sebesar 90,6%, sehingga pencapaian sebesar 90,70%

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2023**

Kode	Usuran /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>					<b>7.563.970.060</b>	<b>7.380.170.688</b>	<b>97,57</b>
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>7.358.490.060</b>	<b>7.180.331.688</b>	<b>97,58</b>
<b>2 07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>					<b>7.358.490.060</b>	<b>7.180.331.688</b>	<b>97,58</b>
<b>2 07 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	<b>71 Angka</b>	<b>68,00</b>	<b>95,77</b>	<b>5.210.554.860</b>	<b>5.074.199.245</b>	<b>97,38%</b>
		<i>IKM</i>	<b>81,99 Angka</b>	<b>81,99 Angka</b>	<b>100%</b>			<b>%</b>
<b>2 07 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah</b>	<b>91 %</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>100%</b>
<b>2 7 1 2.01 1</b>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>100%</i>
<b>2 7 1 2.01 2</b>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>2 7 1 2.01 3</b>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>2 7 1 2.01 6</b>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>0 Laporan</i>	<i>0 Dokumen</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>2 7 1 2.01 7</b>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>7 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>2.800.000</i>	<i>2.800.000</i>	<i>100%</i>
<b>2 07 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</b>	<b>95,5 %</b>	<b>95,5%</b>	<b>100%</b>	<b>4.561.578.060</b>	<b>4.495.442.812</b>	<b>98,55%</b>

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 07 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	48 Orang	96%	4.506.638.060	4.440.502.912	98,53%
2 07 01 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11 Dokumen	100%	54.090.000	54.090.000	100%
2 07 01 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapoarn	0 Lapoarn	0%	0	0	0%
2 07 01 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Lapoarn	100%	850.000	850.000	100%
2 07 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik</b>	<b>95 %</b>	<b>095%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2 07 01 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Lapoarn	0%	0	0	0%
2 07 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>39.278.200</b>	<b>43,64%</b>
2 7 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	100%	90.000.000	39.278.200	43,64%
2 7 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0	0%
2 7 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0	0%
2 7 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%
2 07 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75.144.800</b>	<b>75.088.091</b>	<b>99,92%</b>
2 7 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	100%	5.000.000	4.995.000	99,9%
2 7 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	0%	0	0	0%
2 7 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	100%	9.650.000	9.648.500	99,98%
2 7 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	8.000.000	7.996.500	99,96%
2 7 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	6.685.300	6.685.200	100%
2 7 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1.200.000	1.200.000	100%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 7 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	16.500.000	16.463.000	99,78%
2 7 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	28.109.500	28.099.891	99,97%
2 7 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0	0%
2 07 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>0%</b>	<b>52.350.000</b>	<b>52.350.000</b>	<b>100%</b>
2 7 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0%	0	0	0%
2 07 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%	52.350.000	52.350.000	100%
2 07 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>407.532.000</b>	<b>388.249.543</b>	<b>95,27%</b>
2 07 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	1.000.000	1.000.000	100%
2 07 01 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	89.700.000	76.660.549	85,46%
2 07 01 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	0%	0	0	0%
2 07 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	316.832.000	310.588.994	98,03%
2 07 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>19.850.000</b>	<b>19.690.600</b>	<b>99,11%</b>
2 07 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	245,45%	15.000.000	14.916.800	99,45%
2 7 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%	4.850.000	4.773.800	98,43%
2 07 01 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0%	0	0	0%
2 07 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>	<b>30 laporan</b>	<b>60 Laporan</b>	<b>0%</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.228.700</b>	<b>92,25%</b>
2 07 02 2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase peningkatan database tenaga kerja</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.228.700</b>	<b>92,25%</b>
2 07 02 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.000.000	1.895.200	94,76%
2 07 02 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	1 Perusahaan	100%	1.500.000	1.333.500	8,9%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	55%	100%	%	8.667.000	8.189.400	94,49%
2 07 03 2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah paket pelatihan</b>	40 Paket	40 Paket	100%	6.000.000	5.585.900	93,10%
		<b>Jumlah unit kompetensi</b>	698 Unit	779 Unit	100%			0%
2 07 0 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	248 Orang	248 Orang	100%	6.000.000	5.585.900	93,10%
2 07 03 2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional</b>	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	500.000	458.500	91,7%
2 07 03 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	500.000	458.500	91,7%
2 7 3 2.03	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Lembaga Pelatihan kerja yang memiliki perizinan</b>	5 Lembaga	5 Lembaga	60%	500.000	500.000	100%
2 7 3 2..03 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	3 Perizinant	60%	500.000	500.000	100%
2 7 3 2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan Produktivitas</b>	5 Unit	5 Unit	100%	1.097.000	1.075.000	97,99%
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	5 Perusahaan	100%	1.097.000	1.075.000	97,99%
2 7 3 2.05	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	10 %	10%	100%	570.000	570.000	100%
2 7 3 2.05 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	570.000	570.000	100%
2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan</b>	40%	35%	100%	1.375.842.500	1.362.370.342	99,02%
2 07 04 2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah/Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah fasilitas pelayanan antar kerja</b>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%	1.372.842.500	1.359.403.342	99,02%
2 07 04 2.01 1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	3 Orang	26,67%	330.000.000	328.007.765	99,40%
2 3 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	0 Orang	0%	200.000.000	198.422.000	99,21%
2 07 04 2.01 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	30 Orang	30 0Orang	233,33%	600.000.000	594.605.277	99,10%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
2 07 04 2.01 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Katenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Layanan Disabilitas yang difasilitasi	15 Orang	15 Orang	400%	7.842.500	7.820.000	99,71%
2 7 4 2.01 5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	100 Orang	666,67%	235.000.000	230.548.300	98,11%
2 7 4 2.02	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah LPTKS</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>15 Lembaga</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2 7 4 2.02 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	15 Lembaga	15 Lembaga	0%	0	0	0%
2 7 4 2.02 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	1 Lembaga	0%	0	0	0%
2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah informasi pasar kerja</b>	<b>6 Informasi</b>	<b>5 Informasi</b>	<b>0%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.967.000</b>	<b>98,9%</b>
2	1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Informasi	0 Informasi	0%	0	0	0%
2 7 4 2.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	120 Orang	60%	3.000.000	2.967.000	98,9%
2 7 4 2.03 3	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%
2 07 04 2.04	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi</b>	<b>20 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2 07 04 2.04 1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Diindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%
2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>% perusahaan yang taat aturan</b>	<b>57%</b>	<b>51,70%</b>	<b>90,70%</b>	<b>759.925.700</b>	<b>732.344.000</b>	<b>96,370%</b>
2 07 05 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>	<b>50 Badan Usaha</b>	<b>40 Badan Usaha</b>	<b>80%</b>	<b>139.929.000</b>	<b>128.172.000</b>	<b>91,60%</b>
2 07 05 2.01 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100%	2.606.000	2.548.000	97,77%
2 7 5 2.01 2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	0 Perusahaan	0%	0	0	0%
2 07 05 2.01 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,	2 Laporan	2 Laporan	100%	137.323.000	125.624.000	91,48%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)	
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100	
		Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	dan LKS Bipartit dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan						
2	07	05	2.02						
		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan</b>	<b>50 Perusahaan</b>	<b>130 Perusahaan</b>	<b>260%</b>	<b>619.996.700</b>	<b>604.172.000</b>	<b>97,45%</b>
2	07	05	2.02	1					
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	50 Perkara	100%	175.488.300	169.107.000	96,36%
2	07	05	2.02	2					
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	5 Perkara	100%	723.000	0	0%
2	7	5	2.02	3					
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9 Asosiasi dan Serikat Pekerja	90%	152.345.000	149.735.500	98,29%
2	7	5	2.02	4					
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	290.000.000	283.209.500	97,66%
2	7	5	2.02	5					
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13.800 Orang	22.666 Orang	164,25%	1.440.000	1.440.000	100%
3							205.480.000	199.839.000	97,25%
3	31						205.480.000	199.839.000	97,25%
3	31	02					196.980.000	191.384.000	97,14%
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertumbuhan Usaha Industri</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>57,47%</b>			
3	31	02	2.01				196.980.000	191.384.000	97,14%
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Yang Didampingi	250 Usaha	250Usaha	100%			
3	31	02	2.01	1			1.913.000	1.897.000	99,16%
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100
3 31 02 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.387.000	4.382.000	99,89%
3 31 02 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	150.000.000	148.196.000	98,80%
3 31 02 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.980.000	4.975.000	99,90%
3 31 02 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	35.000.000	31.234.000	89,50%
3 31 02 2.01 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	700.000	700.000	100%
3 31 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>% usaha industri yang memiliki ijin usaha</b>	<b>15%</b>	<b>42%</b>	<b>280%</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.305.000</b>	<b>99,39%</b>
3 31 03 2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (UIU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP</b>	<b>56 Unit</b>	<b>61 Unit</b>	<b>108,93%</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.305.000</b>	<b>99,39%</b>
3 31 03 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	50 Dokumen	5D okumen	100%	3.275.000	3.270.000	99,85%
3 31 03 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	4.075.000	4.035.000	99,02%
3 31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>% usaha industri yang masuk database Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>55%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,64%</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100%</b>
3 31 04 2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Database Industri</b>	<b>1 Database</b>	<b>1 Database</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100%</b>

Kode	Usuran /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)	
1	2	4	5	6	7= (6/5)*100	8	9	10= (9/8)*100	
<b>2</b>		<b>Jumlah Laporan Data Industri yang Dikelola Dengan Baik</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100%</b>	
3	31 04 2.01 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	680.000	680.000	100%
3	31 04 2.01 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0	0	0%
3	31 04 2.01 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	470.000	470.000	100%

- 2.2. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

Kinerja tahun anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masih terdapat program dan kegiatan yang belum tercapai sesuai yang ditargetkan, masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu;

1. Sekretariat Dinperinnaker pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan capaian kegiatan antara target dan realisasi tercapai, akan tetapi dalam program tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu terbatasnya anggaran APBD yang ada pada Dinas, sarana dan prasarana yang masih sangat kurang memadai serta SDM yang masih sangat kurang dari kebutuhan Dinas.

Diharapkan tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menambah anggaran kegiatan melalui APBD, sarana dan prasarana dapat direalisasi sesuai kebutuhan serta SDM untuk dilakukan penambahan untuk mendukung kinerja Dinas.

2. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja dalam bidang tersebut terdapat beberapa Program diantaranya, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dan program penempatan tenaga kerja, secara keseluruhan pada Bidang tersebut realisasi dapat tercapai sesuai target, akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya yaitu masih kurangnya dukungan dari Pemerintah melalui anggaran dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan pada bidang, kekurangan SDM yang mengampu kegiatan, sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dalam bidang tersebut hanya terdapat satu Program yaitu hubungan industrial, % Perusahaan yang taat aturan dari target 57,0% tercapai sebesar 51,70% sehingga pencapaian sebesar 90,70%.

4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dalam bidang tersebut terdapat program perencanaan dan Pembangunan industri, pertumbuhan usaha industri dari target 3,0% tercapai 0,5%, sehingga pencapaian sebesar 16,6%.  
Pencapaian sangat rendah karena terkendala dengan minimnya pendanaan oleh APBD.  
Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota, dalam program tersebut % usaha industri yang memiliki ijin usaha ditargetkan sebesar 15% tercapai sebesar 42%, sehingga pencapaian sebesar 280%
5. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri, dalam bidang tersebut terdapat Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang mempunyai indikator % usaha industri yang masuk dalam database, indikator tersebut tercapai 1,84% dari target sebesar 55%.
  - Penyebab tidak tercapainya target karena program SIINas baru dikenalkan pada tahun 2022, belum ada anggaran untuk kegiatan untuk dapat sosialisai kepada para pelaku usaha industri kecil dan menengah.
  - Kendala yang dihadapi karena Sebagian besar para Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah, masih kesulitan dalam mengakses Sistem Informasi Industri dalam mendapatkan akun SIINas masih kurangnya sosialisasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) kurangnya anggaran untuk kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sistem Industri Nasional (SIINas) bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan menengah.
  - Tindaklanjut perumusan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan yaitu sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) kepada pelaku Usaha Industri dan OPD terkait digencarkan membuka Klinik SIINas, mengajukan anggaran yang memadai melalui APBD, dll.

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2024**

No	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	4	5	6	6	8			8	10	10	11
Renstra 2021-2026												
1	Persentase tingkat pengangguran terbuka	4,75%	4,6%	4,5%	4,3%	1,76%	2,60%	-	-	4,5%	4,3%	Tujuan
2	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,33%	6,59%	-	-	1,5%	2,0%	Tujuan
3	Persentase pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal	5%	7%	10%	12%	7,16%	1	-	-	10	12	sasaran
4	Persentase kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	3,15 triliyun	3,18 triliyun	3,2 triliyun	3,23 triliyun	3,344 triliyun	3,544 triliyun	-	-	3,20 triliyun	3,23 triliyun	sasaran

### **2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat disajikan dalam table 2.4

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				<b>9.500.314.000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				<b>9.500.314.000</b>						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.600.314.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.600.314.000						
2	7				8.600.314.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.600.314.000						
2	7	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang	Nilai SAKIP OPD	72	6.640.314.000						
							Kab. Rembang	IKM	83,69							
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.01</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	<b>93</b>	<b>644.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	<b>93</b>	<b>644.000.000</b>	
2	7	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	616.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	616.500.000	
2	7	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000	
2	7	1	2.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	5.000.000	
2	7	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	5.000.000	
2	7	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12.500.000	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</b>	<b>96,5</b>	<b>5.338.398.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</b>	<b>96,5</b>	<b>5.338.398.000</b>	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 7 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	5.220.448.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	5.220.448.000	
2 7 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	115.950.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	115.950.000	
2 7 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.000.000	
2 7 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	1.000.000	
2 7 1 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik</b>	<b>95</b>	<b>1.500.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik</b>	<b>95</b>	<b>1.500.000</b>	
2 7 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1.500.000	
2 7 1 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>7.000.000</b>	
2 7 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	2.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Rembang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	2.000.000	
2 7 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	2.000.000	
2 7 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	1	2.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	1	2.000.000	
2 7 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Rembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	1.000.000	
2 7 1 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan umum</b>	<b>100</b>	<b>165.266.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan umum</b>	<b>100</b>	<b>165.266.000</b>	
2 7 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket komponen instalasi Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket komponen instalasi Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	5.000.000	
2 7 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	30	49.280.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	30	49.280.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 7 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	20	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	20	10.000.000	
2 7 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	12	11.486.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	12	11.486.000	
2 7 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Rembang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10.000.000	
2 7 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Rembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Rembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	2.000.000	
2 7 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12	16.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12	16.500.000	
2 7 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	60.000.000	
2 7 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Rembang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	1.000.000	
<b>2 7 1 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur</b>	<b>95</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur</b>	<b>95</b>	<b>50.000.000</b>	
2 7 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Kab. Rembang	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Rembang	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	10.000.000	
2 7 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan dan mesin lainnya yang Disediakan	5	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan dan mesin lainnya yang Disediakan	5	40.000.000	
<b>2 7 1 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi</b>	<b>100</b>	<b>389.150.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Rembang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi</b>	<b>100</b>	<b>389.150.000</b>	
2 7 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	1.500.000	
2 7 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	120.000.000	
2 7 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	8.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	8.000.000	
2 7 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	259.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	259.650.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 7 1 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase BMD yang dipelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Rembang	<b>Persentase BMD yang dipelihara dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>	
2 7 1 2.09 1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	11	15.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	11	15.000.000	
2 7 1 2.09 6	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	11	15.000.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	11	15.000.000	
2 7 1 2.09 9	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas</i>	11	15.000.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas</i>	11	15.000.000	
2 7 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Rembang	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>	90	50.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Rembang	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>	90	50.000.000	
2 7 2 2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Kab. Rembang	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>	<b>50</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Kab. Rembang	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>	<b>50</b>	<b>50.000.000</b>	
2 7 2 2.01 1	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro</i>	1	25.000.000	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro</i>	1	25.000.000	
2 7 2 2.01 2	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja mikro</i>	1	25.000.000	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja mikro</i>	1	25.000.000	
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Rembang	<b>Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	<b>60</b>	<b>1.500.000.000</b>	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Rembang	<b>Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</b>	<b>60</b>	<b>1.500.000.000</b>	
2 7 3 2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Kab. Rembang	<i>Jumlah paket pelatihan</i>	45	1.250.000.000	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Kab. Rembang	<i>Jumlah paket pelatihan</i>	45	1.250.000.000	
2 7 3 2.01 1	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	264	1.250.000.000	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	264	1.250.000.000	
2 7 3 2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional</b>	<b>25</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional</b>	<b>25</b>	<b>100.000.000</b>	
2 7 3 2.02 1	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina</i>	8	100.000.000	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina</i>	8	100.000.000	
2 7 3 2.03	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Kab. Rembang	<b>Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan</b>	<b>5</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	Kab. Rembang	<b>Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan</b>	<b>5</b>	<b>50.000.000</b>	
2 7 3 2.03 1	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan</i>	5	50.000.000	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan</i>	5	50.000.000	
2 7 3 2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas</b>	<b>5</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas</b>	<b>5</b>	<b>50.000.000</b>	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kab. Rembang	<b>Jumlah Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktifitas</b>	5	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kab. Rembang	<b>Jumlah Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktifitas</b>	5	50.000.000	
2	7	3	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupa4ten/Kota</b>	Kab. Rembang	<i>Tingkat produktifitas tenaga kerja</i>	20	50.000.000	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupa4ten/Kota</b>	Kab. Rembang	<i>Tingkat produktifitas tenaga kerja</i>	20	50.000.000	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen hasil pengukuran produktifitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah</i>	1	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Rembang	<i>Jumlah dokumen hasil pengukuran produktifitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah</i>	1	50.000.000	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Rembang	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan		150.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Rembang	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan		150.000.000	
2	7	4	2.01		<b>Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja</b>	1	70.000.000	<b>Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja</b>	1	70.000.000	
2	7	4	2.01	1	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan/ lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>	3	15.000.000	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan/ lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>	3	15.000.000	
2	7	4	2.01	3	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL</i>	20	15.000.000	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL</i>	20	15.000.000	
2	7	4	2.01	4	<i>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD</i>	30	15.000.000	<i>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD</i>	30	15.000.000	
2	7	4	2.01	5	<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	15	10.000.000	<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	15	10.000.000	
2	7	4	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah LPTKS</b>	15	10.000.000	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah LPTKS</b>	15	10.000.000	
2	7	4	2.02	1	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi</i>	1	5.000.000	<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi</i>	1	5.000.000	
2	7	4	2.02	2	<i>Pengawasan dan Pengendalian LPTKS</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas</i>	1	5.000.000	<i>Pengawasan dan Pengendalian LPTKS</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas</i>	1	5.000.000	
2	7	4	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah informasi pasar kerja</b>	10	50.000.000	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah informasi pasar kerja</b>	10	50.000.000	
				1	<i>Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1	15.000.000	<i>Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1	15.000.000	
2	7	4	2.03	2	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	2	15.000.000	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>	2	15.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 7 4 2.03 3	Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.000	20.000.000	Job Fair / Bursa Kerja	Kab. Rembang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.000	20.000.000	
2 7 4 2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi</b>	<b>20</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi</b>	<b>20</b>	<b>30.000.000</b>	
2 7 4 2.04 1	<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	20	30.000.000	<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	20	30.000.000	
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Rembang	% perusahaan yang taat aturan	<b>65</b>	<b>250.000.000</b>	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Rembang	% perusahaan yang taat aturan	<b>65</b>	<b>250.000.000</b>	
2 7 5 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>	<b>50</b>	<b>145.000.000</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>	<b>50</b>	<b>145.000.000</b>	
2 7 5 2.01 1	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	15	40.000.000	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	15	40.000.000	
2 7 5 2.01 2	<i>Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>	5	5.000.000	<i>Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>	5	5.000.000	
2 7 5 2.01 3	<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	2	100.000.000	<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	2	100.000.000	
2 7 5 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan</b>	<b>50</b>	<b>105.000.000</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan</b>	<b>50</b>	<b>105.000.000</b>	
2 7 5 2.02 1	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	50	40.000.000	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	50	40.000.000	
2 7 5 2.02 2	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	6	10.000.000	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	6	10.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Rembang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	10.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Rembang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	10.000.000	
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	25.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	25.000.000	
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Rembang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14.500	20.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Rembang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	14.500	20.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Rembang			280.827.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kab. Rembang			280.827.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kab. Rembang			280.827.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kab. Rembang			280.827.000	
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Rembang	Pertumbuhan usaha industri	3,5	800.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Rembang	Pertumbuhan usaha industri	3,5	800.000.000	
3	31	2	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya</b>	<b>200</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya</b>	<b>200</b>	<b>800.000.000</b>	
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	30.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	30.000.000	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	125.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	125.000.000	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	200.000.000	
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	25.000.000	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	400.000.000	
3	31	2	201	6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	20.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Rembang	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	20.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting					
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3	31	3				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	20	40.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang	% usaha industri yang memiliki ijin usaha	20	40.000.000	
3	31	3	2.01			<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Agro Sesuai SOP</b>	<b>61</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kab. Rembang	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Agro Sesuai SOP</b>	<b>61</b>	<b>40.000.000</b>	
							Kab. Rembang	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Ilimatexa Sesuai SOP</b>				Kab. Rembang	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Ilimatexa Sesuai SOP</b>			
3	31	3	2.01	1		<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>	55	25.000.000	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>	55	25.000.000	
3	31	3	2.01	2		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	30	15.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	30	15.000.000	
3	31	4				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Rembang	% usaha industri yang memiliki izin usaha	60	65.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Rembang	% usaha industri yang memiliki izin usaha	60	65.000.000	
3	31	4	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah rekomendasi izin usaha industry sesuai SOP	1	60.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Rembang	Jumlah rekomendasi izin usaha industry sesuai SOP	1	60.000.000	
3	31	4	2.01	1		<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1	20.000.000	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1	20.000.000	
3	31	4	2.01	2		<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas</i>	1	10.000.000	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas</i>	1	10.000.000	
3	31	4	2.01	3		<i>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kot</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan</i>	1	30.000.000	<i>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kot</i>	Kab. Rembang	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan</i>	1	30.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>a dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>		<i>Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>			<i>a dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>		<i>Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>			

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara umum rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang Tahun 2025 namun pada tahap perencanaan di tahun 2025 ini dapat terjadi dinamika perubahan yang mungkin saja terjadi perubahan anggaran pada akhir tahun karena adanya penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas pada Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif dimana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:
  - a. Belum optimalnya pertumbuhan industri dan penerapan inovasi teknologi industri yang berdaya saing
  - b. Kurangnya informasi perusahaan industri atas ketentuan industri
  - c. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah
  - d. Belum optimalnya sistem informasi (market place) ketenagakerjaan, serta masih rendahnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki
  - e. Belum optimalnya perusahaan yang taat peraturan dan masih kurangnya koordinasi lembaga kerja sama tripartit
2. Adanya Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat tertuang di table 2.5 sebagai berikut.

**Tabel 2.5**  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Rembang

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Program : Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja</p> <p>Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi</p> <p>Sub keg : Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.</p> <p>Pekerjaan : Pelatihan kompetensi perempuan</p>	Kab.Rembang	<p>Indikator Program : Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.</p> <p>Indikator kegiatan : Jumlah paket pelatihan</p> <p>Indikator sub kegiatan: jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</p> <p>Indikator pekerjaan: jumlah orang yang mendapatkan pelatihan</p>		
2	<p>Program : Penempatan tenaga kerja</p> <p>Kegiatan : Pelayanan antar kerja di Daerah</p>	Kab Rembang	Indikator Program: % calon		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Keg : Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja</p> <p>Sub Keg : Penyuluh dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja</p> <p>Pekerjaan : Sosialisasi mekanisme prosedur kerja</p> <p>Sosialisasi peluang menembus pasar kerja</p> <p>Sub Keg : Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan</p> <p>Pekerjaan : One with disability</p> <p>Workshop wirausaha bagi penyandang disabilitas</p> <p>Sub Kegiatan: Perluasan kesempatan kerja</p> <p>Pekerjaan : Pelatihan wira usaha untuk perluasan</p>		<p>pencari kerja yang ditempatkan</p> <p>Indikator kegiatan : jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bintek dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi.</p> <p>Indikator sub keg : jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bintek dan lain;lain untuk peningkatan kompetensi.</p> <p>Indikator sub keg : Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan.</p> <p>Indikator sub keg : Jumlah tenaga kerja disabilitas yang</p>		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>kesempatan kerja</p> <p>Sosialisasi peluang mekanisme prosedur kerja</p> <p>Sosialisasi strategi penciptaan lapangan pekerjaan melalui wirausaha</p>		<p>mendapatkan fasilitasi ULD</p> <p>Indikator sub keg : Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja.</p>		
3	<p>Program : Hubungan Industrial</p> <p>Kegiatan : Pengesahan peraturan perusahaan dan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub keg : Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan</p> <p>Pekerjaan : Monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial</p> <p>Kegiatan : Pencegahan dan penyelesaian perselisihan</p>	Kab.Rembang	<p>Indikator Program : Persentase perusahaan yang taat aturan</p> <p>Indikator keg: Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan</p> <p>Indikator sub keg: Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta</p>		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>hubungan industri, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kab/ Kota</p> <p>Sub Keg : Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kab/kota</p> <p>Pekerjaan : Peningkatan kapasitas SDM perusahaan dan buruh</p> <p>Sub Keg : Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah kab/kota</p> <p>Pekerjaan : Fasilitasi operasional LKS tripartit Kab. Rembang</p>		<p>Jamsostek serta pengupahan</p> <p>Indikator keg: Jumlah perselisihan yang dicegah</p> <p>Indikator sub keg: Jumlah perselisihan yang dicegah</p> <p>Indikator sub keg : Jumlah LKS tripartit yang dibina</p>		
4	<p>Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>Kegiatan : Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub keg : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</p>	Kab.Rembang	<p>Indikator program : Jumlah pertumbuhan industri</p> <p>Indikator keg : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri</p> <p>Idikator sub keg : Jumlah</p>		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Sub keg : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat		dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri  Indikator sub keg : Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat		
5	Program : Pengendalian Izin Usaha Industri  Kegiatan : Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan Kab/kota  Sub kegiatan : Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem online single submission riskbase approach (OSS RBA)		Indikator program : Persentase usaha industri yang memiliki izin usaha  Indikator keg : Jumlah rekomendasi izin usaha industri sesuai SOP  Indikator sub keg : Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pekerjaan : Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dalam sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik		dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri (PMDM) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
6	<p>Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p> <p>Kegiatan : Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kab/kota dalam penyampaian data ke SIINas</p>		<p>Indikator Program :</p> <p>Persentase usaha industri yang masuk database</p> <p>Indikator keg : Jumlah database industri</p> <p>Indikator sub keg : Jumlah dokumen hasil pemantauan</p>		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kab/kota dalam penyaampaian data ke SIINas		

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

a. Tujuan

1. Meningkatnya kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin

Indikator Tujuan : Tingkat pengangguran terbuka

2. Meningkatnya pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah

Indikator tujuan: Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

b. Sasaran

1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal

Indikator sasaran: Pertumbuhan serapan tenaga kerja lokal

2. Meningkatnya Usaha Industri

Indikator sasaran: Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2022-2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**  
**Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Penduduk Miskin		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,83	3,67	4,75	2,6	4,5	4,3	4,0
	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Lokal	Pertumbuhan Serapan Tenaga Kerja Lokal	%	4	NA	5	7	10	12	15
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Peran Investasi terhadap Ekonomi Daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	-1,45	4,23	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
	Meningkatnya Usaha Industri	Kontribusi PDRB ADHK Sektor Industri	Trilyun Rupiah	3,2	3,2	3,15	3,18	3,20	3,23	3,25

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- a. Sumber Daya Manusia.  
perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.
- b. Data  
kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting;
- c. Dana  
kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;
- d. Sarana  
sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan

### **3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2021-2026 yang mendatang sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Rembang Gemilang 2026

Misi :

- a. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasai dan tata kerja birokrasi
- b. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial
- c. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- d. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengikuti Misi Ke III dari Misi Kepala daerah Kabupaten Rembang yaitu “Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” berkaitan langsung dengan tugas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang antara lain meliputi:

- Jumlah program 8 yaitu;

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja
- e. Program Hubungan Industrial
- f. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Jumlah Kegiatan 23 dan jumlah sub Kegiatan 69 terdiri dari

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : 1. Nilai saki OPD

2. Nilai IKM OPD

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja  
Indikator: Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

Kegiatan: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

- c) Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator: % Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan

Kegiatan:

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

## 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

### d) Program Hubungan Industri

Indikator: % perusahaan yang taat aturan

Kegiatan:

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

### e) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator: Pertumbuhan usaha industri

Kegiatan:

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

### f) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Indikator: % usaha industri yang memiliki ijin usaha

Kegiatan:

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

### g) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator: %usaha industri yang masuk database

Kegiatan:

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan jumlah program dan kegiatan yang ada maka kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 17,976,092,000,00

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN REMBANG**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pelatihan kerja dan produktifitas Tenaga Kerja  
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
  - a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
4. Program Hubungan Industri
  - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang tahun 2025 adalah sejumlah 8 program yang terdiri dari 23 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 4.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>				<b>17.976.092.000</b>	APBD			<b>9.500.314.000</b>
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.170.546.000				8.600.314.000
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				14.170.546.000				8.600.314.000
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD		73	8.485.448.000			74	6.640.314.000
		IKM		82,36				84,14	
<b>2 7 1 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah		<b>93</b>	<b>510.000.000</b>			<b>94</b>	<b>644.000.000</b>
2 7 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	230.000.000			3	616.500.000
2 7 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	15.000.000			2	5.000.000
2 7 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubaha RKA-SKPD		2	15.000.000			2	5.000.000
2 7 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	150.000.000			3	5.000.000
2 7 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	100.000.000			12	12.500.000
<b>2 7 1 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</b>		<b>96,5</b>	<b>5.490.448.000</b>			<b>97</b>	<b>5.338.398.000</b>
2 7 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50	5.220.448.000			50	5.220.448.000
2 7 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	250.000.000			12	115.950.000
2 7 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	10.000.000			1	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 7 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12	10.000.000			12	1.000.000
2 7 1 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen penatausahaan BMD dengan kualitas baik</b>		<b>95</b>	<b>10.000.000</b>			<b>95</b>	<b>1.500.000</b>
2 7 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	10.000.000			1	1.500.000
2 7 1 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</b>		<b>100</b>	<b>550.000.000</b>			<b>100</b>	<b>7.000.000</b>
2 7 1 2.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1	300.000.000			1	2.000.000
2 7 1 2.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4	100.000.000			4	2.000.000
2 7 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum		1	100.000.000			1	2.000.000
2 7 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	50.000.000			2	1.000.000
2 7 1 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan umum</b>		<b>100</b>	<b>393.000.000</b>			<b>100</b>	<b>165.266.000</b>
2 7 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		50	20.000.000			50	5.000.000
2 7 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan		20	50.000.000			20	49.280.000
2 7 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan		12	25.000.000			12	10.000.000
2 7 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan		12	25.000.000			12	11.486.000
2 7 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12	20.000.000			12	10.000.000
2 7 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12	3.000.000			12	2.000.000
2 7 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		12	30.000.000			12	16.500.000
2 7 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	200.000.000			12	60.000.000
2 7 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1	20.000.000			1	1.000.000
2 7 1 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur</b>		<b>95</b>	<b>510.000.000</b>			<b>95</b>	<b>50.000.000</b>
2 7 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	10.000.000			1	10.000.000
2 7 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan dan mesin lainnya yang Disediakan		5	300.000.000			5	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 7 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	200.000.000			1	0
<b>2 7 1 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi</b>		<b>100</b>	<b>802.000.000</b>			<b>100</b>	<b>1.500.000</b>
2 7 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12	2.000.000			12	120.000.000
2 7 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	150.000.000			12	8.000.000
2 7 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12	200.000.000			12	259.650.000
2 7 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12	450.000.000			<b>12</b>	<b>55.000.000</b>
<b>2 7 1 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang dipelihara dengan baik</b>		<b>100</b>	<b>220.000.000</b>			<b>100</b>	<b>15.000.000</b>
2 7 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		11	100.000.000			11	15.000.000
2 7 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		11	20.000.000			11	15.000.000
2 7 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas		4	100.000.000			4	15.000.000
<b>2 7 2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>		<b>80</b>	<b>200.000.000</b>			<b>100</b>	<b>50.000.000</b>
<b>2 7 2 2.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Cakupan laporan data base tenaga kerja yang dikelola dengan baik</b>		<b>5</b>	<b>100.000.000</b>			<b>5</b>	<b>50.000.000</b>
2 7 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1	100.000.000			<b>1</b>	<b>25.000.000</b>
2 7 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja mikro		1	100.000.000			1	25.000.000
<b>2 7 3</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Pertumbuhan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</b>		<b>65</b>	<b>2.444.552.000</b>			<b>70</b>	<b>1.500.000.000</b>
<b>2 7 3 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Jumlah paket pelatihan</b>		<b>50</b>	<b>2.114.552.000</b>			<b>55</b>	<b>1.250.000.000</b>
2 7 3 2.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		860	2.114.552.000			<b>941</b>	<b>1.250.000.000</b>
<b>2 7 3 2.02</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang memenuhi syarat operasional</b>		<b>280</b>	<b>200.000.000</b>			<b>296</b>	<b>100.000.000</b>
2 7 3 2.02 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30	200.000.000			30	100.000.000
<b>2 7 3 2.03</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan</b>		<b>5</b>	<b>50.000.000</b>			<b>5</b>	<b>50.000.000</b>
2 7 3 2.03 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan		5	50.000.000			5	50.000.000
<b>2 7 3 2.04</b>	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas</b>		<b>5</b>	<b>50.000.000</b>			<b>5</b>	<b>50.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 7 3 2.04 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	<b>Jumlah Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktifitas</b>		<b>5</b>	<b>50.000.000</b>			5	50.000.000
<b>2 7 3 2.05</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Tingkat produktifitas tenaga kerja</i>		30	50.000.000			<b>40</b>	<b>50.000.000</b>
2 7 3 2.05 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<i>Jumlah dokumen hasil pengukuran produktifitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat daerah</i>		1	30.000.000			1	50.000.000
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Calon Pencari Kerja yang Ditempatkan		55	<b>1.832.546.000</b>			55	<b>150.000.000</b>
<b>2 7 4 2.01</b>	<b>Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah fasilitasi pelayanan antar kerja</b>		<b>1</b>	<b>930.000.000</b>			1	70.000.000
2 7 4 2.01 1	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>	<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>		3	100.000.000			3	15.000.000
2 7 4 2.01 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		20	80.000.000			0	0
2 7 4 2.01 3	<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>	<i>Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL</i>		30	500.000.000			30	<b>15.000.000</b>
2 7 4 2.01 4	<i>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD</i>		15	100.000.000			15	15.000.000
2 7 4 2.01 5	<i>Perluasan Kesempatan Kerja</i>	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>		15	150.000.000			15	10.000.000
<b>2 7 4 2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah LPTKS</b>		<b>15</b>	<b>150.000.000</b>			15	10.000.000
2 7 4 2.02 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi		1	50.000.000			1	5.000.000
2 7 4 2.02 2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas		1	100.000.000			1	5.000.000
<b>2 7 4 2.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah informasi pasar kerja</b>		<b>15</b>	<b>450.000.000</b>			<b>20</b>	<b>50.000.000</b>
	1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		1	50.000.000			1	15.000.000
2 7 4 2.03 2	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>		20	200.000.000			20	15.000.000
2 7 4 2.03 3	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja		1.500	200.000.000			1.500	20.000.000
<b>2 7 4 2.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pencari kerja PMI yang terfasilitasi</b>		<b>20</b>	<b>302.546.000</b>			<b>20</b>	<b>30.000.000</b>
2 7 4 2.04 1	<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>	<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>		20	102.546.000			20	30.000.000
2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	% perusahaan yang taat aturan		72	1.208.000.000			80	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 7 5 2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah badan usaha yang taat peraturan perundang-undangan</b>		50	523.000.000			50	145.000.000
2 7 5 2.01 1	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>		15	300.000.000			15	40.000.000
2 7 5 2.01 2	<i>Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan</i>	<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>		5	0			5	5.000.000
2 7 5 2.01 3	<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>		2	223.000.000			<b>2</b>	<b>100.000.000</b>
2 7 5 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang melakukan pencegahan perselisihan</b>		<b>50</b>	<b>685.000.000</b>			50	105.000.000
2 7 5 2.02 1	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>		50	200.000.000			50	40.000.000
2 7 5 2.02 2	<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>		6	35.000.000			6	10.000.000
2 7 5 2.02 3	<i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</i>	<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>		10	50.000.000			<b>10</b>	<b>10.000.000</b>
2 7 5 2.02 4	<i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>		1	100.000.000			1	25.000.000
2 7 5 2.02 5	<i>Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>	<i>Tertindaknya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>		15.200	300.000.000			16.000	20.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.805.546.000				280.827.000
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.805.546.000				280.827.000
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan usaha industri		4,0	2.252.773.000			4.5	800.000.000
3 31 2 2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Usaha Industri yang Didampingi Usahanya</b>		<b>250</b>	<b>2.252.773.000</b>			250	<b>800.000.000</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 2 2.01 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1	100.000.000			1	30.000.000
3 31 2 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1	200.000.000			1	125.000.000
3 31 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1	500.000.000			1	200.000.000
3 31 2 2.01 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1	200.000.000			1	25.000.000
3 31 2 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1	544.773.000			1	400.000.000
3 31 2 201 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1	200.000.000			1	20.000.000
3 31 2 201 7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1	200.000.000			1	0
3 31 2 201 8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		1	100.000.000			1	0
3 31 2 201 9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1	100.000.000			1	0
3 31 2 201 10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1	108.000.000			1	0
31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	% usaha industri yang memiliki ijin usaha		25	478.000.000			30	40.000.000
<b>3 31 3 2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP</b>		<b>66</b>	<b>478.000.000</b>			<b>71</b>	<b>40.000.000</b>
		<b>Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Industri Sesuai SOP</b>		66				71	
3 31 3 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau		55	0			60	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	<i>Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS</i>										
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota		30	0		35	15.000.000
3	31	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1	150.000.000		1	0
3	31	3	2.01	4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1	323.000.000		1	0
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% usaha industri yang memiliki izin usaha		65	1.074.773.000		70	65.000.000
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha industry sesuai SOP		1	1.074.773.000		1	60.000.000
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1	250.000.000		1	20.000.000
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas		1	544.773.000		1	10.000.000
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1	280.000.000		1	30.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen rancangan akhir dalam melakukan perencanaan pengendalian evaluasi program-program dan sasaran maupun prioritas yang akan di laksanakan setiap Tahun. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja tahun 2025 yaitu terkait pembiayaan yang masih kurang, yang akan berpengaruh dengan pencapain target akhir tahun 2025. Sarana prasarana yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum cukup memadai.

Adapun upaya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan perlu adanya pelaksanaan evaluasi pada Tahun sebelumnya dan di tunjang dengan melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan.

Rencanan Kerja (RENJA) Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, responsif, efisien dan efektif dimana masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, selanjutnya dapat melakukan antisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah melalui cara atau proses yang paling optimal.

Rembang, 05 Agustus 2024

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN REMBANG



Drs. DWI MARTOPO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670313 199401 1 001